

## PENGEMBANGAN DESA SUKAPURA MENUJU *SMART VILLAGE*

Agung Nurrahman

Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Sumedang, Jawa Barat

*E-mail:* anagoenx@gmail.com

**ABSTRAK.** Isu *smart city* menjadi isu yang hangat saat ini di Indonesia. Adapun bangunan utama dari terciptanya tatanan level kota yang baik adalah dengan baiknya level kelurahan dan atau desa sebagai batu bata penyusun bangunan tersebut. Oleh karenanya peneliti tertarik untuk mengambil fokus pada adopsi konsep *smart village*. Peneliti mengambil studi kasus pada Desa Sukapura. Desa ini memiliki beberapa keunikan, pertama diantaranya pada aspek website -sebagai perwujudan dari realitas virtual yang merupakan salah satu ciri khas pengembangan *smart city*- belum adanya website desa yang reliable; kedua, padahal desa tersebut disebut sebagai desa yang merepresentasikan *smart village* kabupaten Bandung; ketiga, jika ingin merujuk pada desa tersebut secara virtual, maka perlu mengandalkan situs pemerintah kabupaten yang juga ternyata dinilai unreliable; keempat, belum adanya evaluasi mengenai ketercapaian konsep *smart village* pada desa tersebut. Dikarenakan hal tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengembangan desa menuju *smart village* di Desa Sukapura Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat; khususnya pada aspek *smart government*. Peneliti menggambarkan aspek dari pengembangan desa menuju *smart village* berdasarkan konsep dari T.V. Ramachandra, Ganesh Hegde, M.D. Subash Chandran, Tejaswini Ananth Kumar dan Vishnumayananda Swamiji (2015). Metode penelitian yang dilakukan adalah dengan desain atau rancangan kualitatif untuk mengetahui secara mendalam dan harapannya menyeluruh hasil dari pertanyaan penelitian. Temuan dari penelitian ini adalah pengembangan desa menuju *smart village* di Desa Sukapura belum dapat dikatakan cukup baik, khususnya apabila dilihat dari keempat dimensi pendukung dalam pengembangan desa menuju *smart village*, disimpulkan bahwa pada dimensi sumber daya, terdapat sumber daya manusia perangkat desa yang cukup mampu beradaptasi pada perubahan, dan terdapat peningkatan kualitas pendidikan masyarakat Desa Sukapura. Sementara pada dimensi teknologi, masih terdapat kendala ketergantungan terhadap pihak lain, termasuk kendala server yang error sehingga berimplikasi pada terhambatnya pelayanan kepada masyarakat. Pada dimensi institusi, pengembangan Desa Sukapura menuju *smart village* belum didukung oleh regulasi dan master plan yang jelas dalam bentuk Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Desa Sukapura. Pada dimensi keberlanjutan, pemerintahan Desa Sukapura berkomitmen dalam mengembangkan desa dalam jangka panjang, namun perlu didukung oleh grand desain dan milestone yang jelas terkait arah dan tahapan dari *smart village* itu sendiri.

**Kata Kunci:** Pemerintah Cerdas, Pengembangan Desa Sukapura, Sukapura *Smart village*.

## DEVELOPMENT OF SUKAPURA VILLAGE TOWARDS *SMART VILLAGE*

**ABSTRACT.** The issue of smart cities is a hot issue today in Indonesia. The main building of creating a good city-level order is the good level of the village and or village as the building bricks. Therefore, researchers are interested in focusing on the adoption of the smart village concept. The researchers took a case study in Sukapura Village. This village has several uniqueness, first of which is in the aspect of the website -as the embodiment of virtual reality which is one of the characteristics of smart city development- the absence of a reliable village website; second, even though the village is referred to as a village that represents the smart village of Bandung regency; third, if you want to refer to the village virtually, it is necessary to rely on the district government site which is also considered unreliable; Fourth, there has been no evaluation of the achievement of the smart village concept in the village. Because of this, the purpose of this study is to find out and analyze the development of villages towards smart villages in Sukapura Village, Dayeuhkolot District, Bandung Regency, West Java Province; and to find out and analyze the right strategy to be carried out by Sukapura Village in developing the village towards a smart village, especially in smart government. The research method carried out is by qualitative design to find out in depth answer and hopefully the overall results of the research question. The findings of this study are 1) Village development towards smart villages in Sukapura Village cannot be said to be good enough yet, especially when viewed from the four supporting dimensions in village development towards smart villages, it is concluded that in the resource dimension, there are human resources in the village government that are quite capable and quickly adapt to changes, and there is an improvement in the quality of education for the people of Sukapura Village. Meanwhile, in the technology dimension, there are still server error constraints, which have implications for hampering services to the community. In the institutional dimension, the development of Sukapura Village towards a smart village has not been supported by clear regulations and master plans in the form of Regional Regulations and/or Sukapura

*Village Regulations. In the sustainability dimension, the Sukapura Village administration is committed to developing the village in the long term, but it needs to be supported by a clear grand design and milestones related to the direction and stages of the smart village itself.*

**Keywords:** *Smart government, Sukapura Village Development, Sukapura Smart village.*

## PENDAHULUAN

Konsep *smart city* telah diterapkan di beberapa negara di dunia. Pada negara-negara di Eropa seperti Austria menjadi salah satu kota yang berhasil menerapkan *smart city*. Implikasinya, kota menjadi semakin maju dalam penyelesaian permasalahan kota. Dalam mendukung penerapan *smart city* di Austria, dilakukan juga perencanaan terpadu, inovasi dan Kolaborasi serta pembangunan perkotaan yang modern. Mengikuti jejak Austria, Swedia pun turut menerapkan *smart city* dengan mengedepankan pelestarian lingkungan. Indonesia pun telah menerapkan *smart city* dengan mengedepankan upaya inovatif dari pemerintah daerah. Dukungan dari Pemerintah Pusat, dalam hal ini adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika, sangat jelas dalam mengarahkan pengembangan *smart city* di Indonesia. Salah satunya melalui program gerakan menuju 100 *smart city*, yang dianggap sebagai langkah awal untuk mewujudkan bangsa Indonesia menjadi digital nation.

Tindak lanjut tersebut dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan menyusun masterplan dan quickwin *smart city* pada 100 kabupaten/kota tersebut. Salah satunya Pemerintah Kabupaten Bandung yang turut mengembangkan dan menerapkan *smart city* yang meliputi smart environment, smart society, smart living, smart economy, smart branding dan smart governance. Selain itu Pemerintah Kabupaten Bandung mendukung penerapan *smart city* dengan tersedianya informasi melalui website <http://smartcity.bandungkab.go.id/>. Salah satu inovasi dari *smart city* di Kabupaten Bandung adalah adanya program seribu kampung yang digagas oleh Bapak Bupati Dadang Naser. Program seribu kampung merupakan salah satu wujud dari penerapan *smart village*. *Smart village* merupakan adopsi dari *smart city* yang juga bertujuan dalam memberikan kemudahan kepada masyarakat agar memperoleh informasi

secara tepat dan cepat. Tiga elemen pokok dari *smart village* adalah *smart government*, smart community dan smart environment (Herdiana, 2019).

Penelitian dengan fokus *smart village* telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu. Subekti & Damayanti (2019) melakukan penelitian yang berfokus pada penerapan model *smart village* dalam pengembangan desa wisata di Kabupaten Malang. Penelitian tersebut menggunakan konsep peluang dan tantangan *smart village* dalam pengelolaan desa wisata yang dikembangkan oleh European Network for Rural Development dimana terdapat 6 (enam) dimensi dalam *smart village* yaitu smart people, smart promotion, smart environmental, smart economy dan *smart government*. Temuan penelitian tersebut bahwa upaya dalam penerapan model *smart village* belum maksimal, hal ini dilihat pada aspek masyarakat dan pemerintah yang belum siap dalam pembangunan *smart village*.

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Herdiana (2019) yang memfokuskan pada pengembangan konsep *smart village* bagi desa-desa di Indonesia. Temuan penelitian menjelaskan bahwa terdapat 3 elemen penting dalam *smart village* yaitu smart environment, smart community dan *smart government*. Melalui ketiga elemen tersebut, perlu dilakukan sinergitas antar elemen yang didukung dengan teknologi sehingga dapat mewujudkan produktifitas dari ketiga elemen *smart village* tersebut. Prayogi, et.al (2020) telah menghasilkan penelitian yang berfokus pada penerapan aplikasi pelayanan desa berbasis mobile dengan konsep *smart village* di Kabupaten Pamekasan. Penelitian menunjukkan adanya website dan aplikasi berbasis mobile dalam pengembangan *smart village* dapat memberi kemudahan bagi administrator desa.

Merujuk pada penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui informasi bahwa penelitian ini belum pernah dilakukan sebelumnya dan penulis menjelaskan perbedaan dalam penelitian ini terletak pada fokus penelitian dan konsep yang digunakan dalam menganalisis permasalahan penelitian. Pada penelitian ini memfokuskan pada pengembangan desa menuju *smart village* di Desa Sukapura Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung. Adapun konsep yang peneliti akan jadikan sebagai acuan dalam analisis adalah konsep *smart village* yang dikemukakan oleh T.V. Ramachandra, Ganesh Hegde, M.D. Subash Chandran, Tejaswini Ananth Kumar dan Vishnumayananda Swamiji (2015) dimana *smart village* memiliki dimensi sumber daya, institusi, teknologi dan keberlanjutan. Oleh karena itu, originalitas dan hasil penelitian ini nantinya dapat dijamin, walaupun ada beberapa penelitian di dunia dan di Indonesia yang juga mengkaji permasalahan *smart village*, dan mengingat penelitian terkait *smart village* di Indonesia yang masih jarang ditemukan.

Adapun lokus penelitian adalah pada Desa Sukapura. Hal tersebut dikarenakan desa tersebut sebagai salah satu desa di Kabupaten Bandung yang menerapkan *smart village* adalah Desa Sukapura Kecamatan Dayeuhkolot. Gambaran mengenai hal tersebut diantaranya Desa Sukapura telah memiliki aplikasi open sistem informasi desa (SID) yang berbasis web. Selain itu, tersedia juga aplikasi Sistem Aplikasi Layanan Mandiri (SALAMAN) yang berbasis mobile android dan website. *smart village* di Desa Sukapura Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat. Adapun terdapat beberapa pertanyaan yang menjadi suatu persoalan dari konsep *smart village* Desa Sukapura tersebut. Pertama, belum ditemukannya situs khusus Desa Sukapura, sebagaimana yang diketahui bahwa dalam realitas virtual, keberadaan suatu entitas diukur dari keberadaan situs di dunia maya. Kedua, adapun untuk akses secara spesifik pada desa dengan konsep *smart village* masih harus mengandalkan satu pintu utama,

yaitu website <http://smarcity.bandungkab.go.id>. Ketiga, dari observasi awal peneliti, website tersebut masih belum memiliki informasi yang cukup dalam merepresentasikan Desa Sukapura yang dianggap memiliki konsep *smart village*. Keempat, kecenderungan kurangnya informasi tersebut semakin menguatkan dugaan peneliti bahwa belum terdapatnya evaluasi, khususnya dari akademisi terkait keberjalanan dan konsep *smart villages* tersebut. Terakhir namun tidak kurang, bahwasannya Desa Sukapura ini menjadi benchmark konsep *smart villages* di Kabupaten Bandung, oleh karenanya perlu ada suatu pengukuran kualitas dari konsep tersebut serta keberjalanannya. Terkait dengan hal tersebut, merujuk pada konsep *smart village* T.V. Ramachandra, Ganesh Hegde, M.D. Subash Chandran, Tejaswini Ananth Kumar dan Vishnumayananda Swamiji (2015) maka terdapat potensi kekurangan pada aspek institusi, teknologi dan keberlanjutan. Hal tersebut menunjukkan bahwa 3 dari 4 dimensi menggambarkan lebih dari 50% kualitas *smart village* di desa tersebut diduga dinilai kurang, oleh karenanya penelitian ini perlu untuk dilakukan guna mencari tahu benar atau tidaknya serta seberapa jauhnya derajat dari dugaan tersebut.

Pengambilan data oleh peneliti akan memfokuskan pada pengembangan *smart village* tahun 2020 dan 2021 di Desa Sukapura Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung. Tujuan penelitian Untuk mengetahui dan menganalisis pengembangan desa menuju *smart village* yang berfokus pada *smart government* di Desa Sukapura Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat.

## METODE

Penelitian ini dirancang secara kualitatif mengingat perlunya kedalaman kualitas dari jawaban setiap pertanyaan. Peneliti menggambarkan aspek dari pengembangan desa menuju *smart village* berdasarkan konsep dari T.V. Ramachandra, Ganesh Hegde, M.D. Subash Chandran, Tejaswini Ananth Kumar dan

Vishnumayananda Swamiji (2015) diketahui bahwa *smart village* memiliki dimensi sumber daya, institusi, teknologi dan keberlanjutan. Terkait penelitian ini, peneliti menggunakan teknik purposive sampling. Menurut Silalahi (2012), “pemilihan sampel *purposive* atau bertujuan, kadang-kadang disebut sebagai judgement sampling, merupakan pemilihan kepada siapa subjek yang ada dalam posisi terbaik untuk memberikan informasi yang dibutuhkan”. Melalui teknik tersebut, peneliti berharap dapat memudahkan peneliti dalam melakukan analisa terhadap pengembangan desa menuju *smart village* di Desa Sukapura Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung. Adapun informan penelitian ini adalah: Kepala Desa Sukapura, Sekretaris Desa Sukapura, Kepala Seksi Pemerintahan Desa Sukapura, Kepala Seksi Pelayanan Desa Sukapura, Kepala Urusan Keuangan Desa Sukapura, Kepala Urusan Umum Desa Sukapura, dan Tokoh Masyarakat. Adapun penentuan tersebut dilakukan secara *purposive sampling* dimana mereka dipilih berdasarkan peran mereka yang dapat mempengaruhi adopsi dan implementasi kebijakan *smart city*. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara secara in depth interview dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan cara reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 1992).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pengembangan Desa Sukapura Menuju *Smart village*

Pengembangan desa menuju *smart village* di Desa Sukapura telah diterapkan sejak tahun 2018, diketahui bahwa Desa Sukapura telah memiliki 3 (tiga) aplikasi dan 1 (satu) website desa dalam penyelenggaraan fungsi

pemerintahan Desa Sukapura. Peneliti melakukan kajian terkait pengembangan Desa Sukapura menuju *smart village* dengan menggunakan *guide theory* dari Ramachandra, et.al (2015) yang menyatakan bahwa dalam pengembangan *smart village* perlu memperhatikan 4 (empat) dimensi yaitu sumber daya, institusi, teknologi, dan keberlanjutan. Adapun uraian atas dimensi dari pengembangan desa menuju *smart village* dapat diuraikan sebagai berikut:

#### 1) Sumber Daya

Ketersediaan sumber daya menjadi salah satu dimensi yang berperan penting dalam pengembangan desa menuju *smart village* di Desa Sukapura. Ketersediaan sumber daya dibagi menjadi 2 (dua) yaitu: sumber daya alam yang terdiri dari tanah, air dan energi serta sumber daya manusia. Sumber daya alam terdiri atas tanah, air, dan energi. Lebih jauh lagi sampah dapat menjadi sumber daya tersendiri, dimana sejauh ini peneliti telah mendapati terdapat beberapa tempat atau titik-titik pengolahan sampah. Adapun sepertinya perhatian terhadap semua hal tersebut, masih belum didapati perhatian yang cukup. Padahal persoalan lingkungan merupakan persoalan yang dewasa ini akan menjadi isu nasional bahkan global. Lebih jauh lagi perhatian terhadap lingkungan sebenarnya merupakan amanat filsafat bangsa yaitu Pancasila atau khususnya dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab, dimana salah satu bentuk adab adalah bagaimana adab terhadap lingkungan diperhatikan dengan baik.

Sumber daya manusia di Desa Sukapura terdiri atas aparatur pemerintah desa dan masyarakat di Desa Sukapura. Pegawai yang ada di Desa Sukapura saat ini sejumlah 14 (empat belas) pegawai. Secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 1. Susunan Personalia Perangkat Desa Sukapura**

No	Nama	Jabatan	Pendidikan
1.	Ganjar Sukmawibawa., A.Md	Kepala Desa	Diploma
2.	Deni Sugandi, S.S	Sekretaris Desa	S1
3.	Yusup Bayu Adzie	Kepala Seksi Pemerintahan	SMA
4.	Restu Pratiwi	Kepala Seksi Kesejahteraan	SMA
5.	Andri Firmansyah, S.S	Kepala Seksi Pelayanan	S1
6.	Karman, SE.	Kepala Urusan TU dan Umum	S1
7.	Yenie Rochilah	Kepala Urusan Keuangan	SMA
8.	Taufan Dharmawandi., SE	Kepala Urusan Perencanaan	S1
9.	Deni Ilahi	Kepala Dusun 1 Sukapura	SMA
10.	Agus Supriagus Adin	Kepala Dusun 2 Mengger Hilir	SMA
11.	Agan Gumilang	Kepala Dusun 3 Sukapura	SMK
12.	Asep Heryawan	Staff	SMA
13.	Atau Sugiarto., A.Md	Staff	D3
14.	Muhammad Anto	Staff	SMA

Merujuk pada tabel diketahui informasi bahwa dari aspek sumber daya manusia yang terdiri atas perangkat desa, memiliki 5 (lima) orang pegawai yang sudah sarjana. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Sukapura pada tanggal 20 September 2021, pukul 11:00 WIB, bahwa:

“Kalau saya perhatikan di desa Sukapura dari segi sumber daya manusianya atau SDM nya sudah mumpuni ya karena: 1. Kita dekat sekali dengan Universitas Telkom, 2. Kita berbatasan langsung dengan kotamadya, pola pikir masyarakatnya sudah maju dan pendidikannya juga sudah di atas rata-rata kalau saya lihat di statistik. Karena kan Sukapura sudah banyak perumahan besar jadi otomatis banyak penduduk dari luar yang menjadi warga masyarakat dan saya

*Sumber: Olahan Peneliti dari Profil Desa Sukapura, 2020*  
perhatikan banyak dari mereka juga yang peduli kepada lingkungan”.

Lebih lanjut ditegaskan kembali oleh Sekretaris Desa Sukapura pada tanggal 20 September 2021, pukul 11:00 WIB, bahwa:”SDM di Desa Sukapura bisa saya pastikan karena sekarang kebanyakan dari anak-anak muda, sarjananya juga sudah ada 5 lah jadi setidaknya untuk hal yang berbau teknologi tidak gaptek lah. Selama Pak Kades yang baru menjabat kita sudah menjadi lomba juara umum administrasi kecamatan”.

Merujuk pada hasil wawancara tersebut diketahui bahwa dari tingkat pendidikan, sumber daya manusia yang berasal dari perangkat desa di Desa Sukapura sudah memadai, karena latar belakang pendidikan sarjana dan diploma sangat membantu dalam penyelenggaraan pemerintahan desa terutama dalam mendukung pengembangan desa menuju *smart village*. Di sisi lain, jika mengkaji terkait

kualitas sumber daya manusia itu sendiri yang dapat dilihat dari kemampuan pegawai dalam mengoperasikan teknologi atau aplikasi pendukung *smart village*, berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Seksi Pemerintahan Desa Sukapura pada tanggal 20 September 2021, bahwa:

“untuk aplikasi memang butuh pelatihan. Kebanyakan disini perangkat desanya baru, termasuk saya baru jadi butuh penyesuaian dulu bagaimana cara menggunakan aplikasi tapi alhamdulillah belum menemukan kesulitan yang serius sih”. Di sisi lain disampaikan pula oleh Kepala Seksi Pelayanan Desa Sukapura pada 7 Juni 2021, bahwa: “dari segi SDM memang sebaiknya dilakukan pelatihan ya untuk perangkat desa, tapi bagusya disini kita semua sama-sama belajar terutama saat ada aplikasi baru, karena harus cepat menyesuaikan dan beradaptasi”.

Terkait dengan kegiatan pelatihan dan pendampingan bagi perangkat desa, telah dilakukan, dan berdasarkan informasi dari Sekretaris Desa Sukapura pada tanggal 20 September 2021, pukul 11:00 WIB, bahwa kegiatan Bimbingan Teknis diberikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Bandung kepada aparat desa khususnya bagi perangkat yang ditugaskan oleh desa. Untuk Desa Sukapura, penunjukan admin ditugaskan kepada Sekretaris Desa Sukapura, dan pada saat kegiatan Bimtek, diinformasikan bahwa Pemerintah Kabupaten Bandung akan melakukan integrasi aplikasi BELADIRI yaitu inovasi dari Bupati Bandung dimana pada aplikasi tersebut akan menampung semua aspirasi dari masyarakat Kabupaten Bandung. Aplikasi tersebut sejenis dengan aplikasi Laporan yang lebih dulu dimiliki oleh Pemerintah Kota Bandung dan Kota Jakarta.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan para informan diketahui informasi bahwa sejak aplikasi dan website yang mendukung *smart village* di Desa Sukapura, kegiatan pelatihan bagi perangkat Desa

Sukapura belum dilakukan secara menyeluruh. Dimana tidak semua perangkat desa mengikuti kegiatan pelatihan yang diadakan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung tersebut. Terutama pada tahun 2020 menurut informasi dari Sekretaris Desa Sukapura, bahwa belum dilaksanakan kegiatan pelatihan atau Bimtek dikarenakan adanya pandemi Covid di awal tahun 2019. Sementara Bimtek yang telah diikuti oleh Sekretaris Desa pada tahun 2021, dapat dikategorikan juga mendukung pengembangan *smart village* namun untuk pelatihan dan Bimtek yang berkaitan langsung dengan para operator atau admin dari aplikasi dan website pendukung *smart village* belum dilakukan. Sehingga, perangkat desa melakukan adaptasi dan secara otodidak mengoperasikan aplikasi dan website tersebut.

Sementara, berkaitan dengan peran dan tanggung jawab dari perangkat desa, selain melaksanakan tugas dan fungsi sehari-hari, juga telah dilakukan penugasan secara lisan oleh Kepala Desa Sukapura kepada beberapa orang perangkat desa untuk mengoperasikan aplikasi dan website pendukung *smart village* di Desa Sukapura. Adapun secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2. Penugasan SDM Pendukung *Smart village***

No.	Nama Pegawai	Peran berdasarkan Penugasan
1.	Ganjar Sukmawibawa., A.Md	Penanggungjawab
2.	Deni Sugandi, S.S	Admin
3.	Yusup Bayu Adzie	Operator
4.	Andri Firmansyah, S.S	Operator
5.	Taufan Dharmawandi., SE	Operator

Sumber: Hasil Wawancara kepada Sekretaris Desa Sukapura, 2021

Merujuk pada tabel di atas, diketahui bahwa penanggungjawab yaitu Kepala Desa Sukapura, dan peran sebagai admin dan operator yang ditugaskan kepada 4 (empat) orang perangkat desa tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pemerintahan Desa Sukapura pada tanggal 20 September 2021, bahwa peran dari penanggung jawab juga sebagai pengelola kebijakan dimana berperan dalam

verifikasi data. Sebelum data dipublikasi kepada masyarakat, maka data tersebut perlu diverifikasi terlebih dahulu. Selanjutnya ada admin dan operator yang berperan dalam menginput data untuk diolah di dalam aplikasi dan website pendukung *smart village* terutama untuk Sistem Informasi Desa (SID) yang nantinya dapat dimunculkan pada website Desa Sukapura. Selain itu, secara berkala admin juga melakukan penulisan artikel dan berita terkini terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat desa pada waktu tertentu, untuk kemudian dipublikasikan kepada masyarakat.

Namun, penugasan tersebut baru bersifat lisan, dan belum dilakukan secara tertulis atau belum dituangkan dalam surat penugasan berbentuk surat perintah atau surat keputusan dari kepala desa. Sebagaimana informasi yang peneliti peroleh dari Kepala Seksi Pemerintahan Desa Sukapura pada tanggal 20 September 2021, bahwa:

“SID itu terkait dengan berbagai hal, jadi untuk operatornya terkait perkembangan desa atau apa kan kalau di desa ada tupoksi ya jadi kita juga bagi-bagi kalau operator bisa berapa orang kalau admin Cuma 1 orang. Saat ini baru lisan, belum ada surat penugasan. Harusnya ada surat penugasan agar ada tanggungjawab masing-masing ya. Jadi sekarang berjalannya ya sudah semua seksi bertanggung jawab untuk handle SID. Adminnya Kasipem atau pak Sekdes. SID bentuknya website, dan ada username dan password yang dikelola oleh Pak Sekdes ya. Dan kita menjaga kerahasiaan datanya ya, jadi yang log in hanyalah perangkat desa. Masyarakat hanya bisa melihat”.

Peneliti menilai bahwa dalam membagi habis tugas perangkat desa yang bertanggung jawab dalam pengembangan Desa Sukapura menuju *smart village* sebaiknya dapat diperkuat dengan membuat Surat Keputusan Kepala Desa. Dengan demikian, pegawai yang menerima tanggung jawab dapat melaksanakan tugasnya dengan lebih baik.

Selanjutnya berkaitan dengan sumber daya manusia dilihat dari penduduk di Desa Sukapura, dapat dilihat bahwa dari tingkat pendidikan sebagaimana tabel 1. diperoleh informasi bahwa Desa Sukapura memiliki potensi sumber daya yang cukup memadai, dilihat dari tingkat pendidikan yang telah diraih oleh penduduk Desa Sukapura, diantaranya penduduk yang telah melanjutkan sekolah setelah menyelesaikan Sekolah Menengah Atas (SMA) adalah sejumlah 893 orang. Hal ini menginformasikan bahwa dari segi sumber daya manusia, penduduk Desa Sukapura cukup siap dalam turut berpartisipasi mendukung pengembangan desa menuju *smart village*.

Namun, masih juga terdapat penduduk yang belum tamat SD, belum tamat SMP, dan belum tamat SMA, di lingkungan Desa Sukapura. Melalui aplikasi *smart village* yaitu PRODESSEL yang fungsinya memuat data awal terkait informasi desa, sehingga melalui data awal tersebut dapat menentukan arah pembangunan desa. Maka, Pemerintah Desa Sukapura dapat meng-cover penduduk yang belum tamat SD, belum tamat SMP, dan belum tamat SMA, untuk melakukan atau melanjutkan pendidikan melalui paket A, B dan C. Hal ini sejalan dengan informasi dari Kepala Seksi Pemerintahan Desa Sukapura pada tanggal 20 September 2021, bahwa:

“PRODESSEL fungsinya informasi desa juga terkait banyak hal juga sih, kita bisa lihat beberapa item. Sebetulnya sih PRODESSEL lebih kepada data awal, jadi yang saya bayangin itu, arah pembangunan desa mau seperti apa, mau kemana bisa dilihat dari data, misal dari sistem pendidikan ini kita lihat sumber daya manusia di Sukapura itu seperti apa, misalnya yang tidak sekolah berapa persen, sehingga arah pembangunan itu bisa jelas dilakukan. Sehingga jika butuh peningkatan SDM di Desa Sukapura maka bisa ditentukan perlu kerjasama dengan Paket A, B, C dan alhamdulillah sekarang berjalanlah kerjasama itu di Desa Sukapura”.

Pernyataan tersebut juga ditegaskan oleh Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Sukapura bahwa pada tahun 2020 telah dilaksanakan kerjasama dengan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Saudara Sejiwa, dimana terdapat sejumlah 30 orang penduduk Desa Sukapura yang melaksanakan paket A untuk Program Sekolah Dasar, Paket B untuk Program Sekolah Menengah Pertama dan paket C untuk Program Sekolah Menengah Atas. Sementara terdapat sejumlah 26 penduduk Desa Sukapura yang mengikuti paket A, paket B dan Paket C pada tahun 2021. Adapun biaya pendidikan gratis hingga penduduk memperoleh Ijazah.

Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Sukapura cukup *concern* terkait peningkatan kualitas pendidikan sumber daya manusia terutama bagi penduduknya. *Smart village* dinilai dapat menjadi solusi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat di pedesaan (Ahlawat, 2017). *Smart village* dapat menjawab masalah yang umumnya terjadi di pedesaan. Salah satunya adalah permasalahan rendahnya tingkat pendidikan (Aziiza & Susanto, 2020).

Merujuk pada uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pada dimensi sumber daya manusia, dilihat dari sisi perangkat desa, Pemerintah Desa Sukapura telah memiliki perangkat desa yang cukup mumpuni dan mudah beradaptasi dengan perubahan, terutama dalam penggunaan dan pemanfaatan aplikasi dan website pendukung *smart village*. Di sisi lain, pelatihan dan pendampingan pun masih perlu dilakukan baik dari dinas maupun dari pemerintah desa itu sendiri. Pelatihan yang diberikan secara rutin dan berkelanjutan diharapkan mampu membekali para perangkat desa semakin optimal dalam pemanfaatan teknologi. Sementara dengan pemberian insentif atau beasiswa kepada aparatur desa untuk melanjutkan pendidikan juga dinilai dapat meningkatkan SDM perangkat desa yang unggul dalam mendukung pengembangan Desa menuju *smart village* (Fitrianti et al., 2021).

## 2) Institusi

Selain mempersiapkan sumber daya, dalam pengembangan desa menuju *smart village* juga perlu mempersiapkan institusi, dimana institusi dinilai sebagai pondasi awal dari pengembangan *smart village*. Institusi yang sesuai dengan kondisi dari pengembangan Desa Sukapura menuju *smart village* di lapangan adalah terdiri atas Lembaga Pemerintahan Desa, Lembaga Keagamaan Desa dan *Research Labs*. Merujuk pada *smart village* yang ada di India, juga terdapat kontribusi dari *Gram Panchayat*, dimana *Gram Panchayat* merupakan lembaga pemerintahan desa dasar yang terdapat di desa-desa di India. Merujuk pada informasi tersebut, maka *Gram Panchayat* di India memiliki fungsi seperti pemerintahan desa di Indonesia, yang terdiri atas kepala desa dan perangkatnya.

Lembaga pemerintahan desa di Desa Sukapura terdiri atas Kepala Desa dan Perangkat Desa, dimana Kepala Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibantu oleh Sekretaris Desa. Perangkat Desa Sukapura terdiri atas 3 (tiga) Kepala Seksi dan 3 (tiga) Kepala Urusan (Kaur). Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan yang merupakan Kepala Desa dan perangkat desa di Desa Sukapura sepakat menyatakan bahwa kesemuanya mendukung dan siap untuk menerapkan *smart village* di Desa Sukapura.

Sementara Lembaga Keagamaan Desa yang menjadi informan peneliti adalah perwakilan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang ada di lingkungan Desa Sukapura. Posisi MUI disini berperan memberikan control dan arahan terhadap keberjalanan pemerintahan desa berbasis teknologi menuju tujuan yang tepat, salah satunya adalah Pancasila. Disamping hal itu, MUI juga berperan sebagai wadah penyampaian aspirasi masyarakat serta wujud dari kekuatan simpul masyarakat di pedesaan.

Adapun *research lab* juga menjadi salah satu aspek penentu dalam pengembangan suatu desa menuju *smart village*. Desa Sukapura secara faktual belum memiliki *research lab*, namun berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Kepala Seksi

Pemerintahan dan Sekretaris Desa Sukapura dinyatakan bahwa dalam pengembangan desa menuju *smart village*, Pemerintah Desa menjalin kolaborasi dengan Telkom University (Tel-U). Diketahui bahwa Tel-U merupakan satu-satunya Universitas atau Perguruan Tinggi yang terdapat di wilayah Desa Sukapura. Bentuk kolaborasi tersebut dimaksudkan dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa dengan pemanfaatan teknologi dan mendukung desa menuju *smart village* serta *Go Digital*. Diketahui bahwa kolaborasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan *smart village*, disamping kepemimpinan, modal sosial dan pendanaan (Maharania & Kencono, 2021).

Bentuk kolaborasi yang telah dilakukan pada bulan Februari 2021 terdiri atas perancangan website Desa Sukapura. Diketahui sebelumnya bahwa Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kabupaten Bandung telah menyediakan website untuk seluruh desa di Kabupaten Bandung dalam mendukung penerapan pemerintahan berbasis teknologi. Website Desa Sukapura dapat diakses melalui <https://sukapura.desa.id/>. Website desa tersebut merupakan wujud dari keterbukaan informasi publik melalui sistem informasi desa (SID). Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Sukapura, Sekretaris Desa Sukapura dan Kepala Seksi Pemerintahan Desa Sukapura, diperoleh informasi bahwa sejak bulan April 2020, website tersebut *error* sehingga tidak bisa dimanfaatkan oleh perangkat desa. Hal tersebut menjadi salah satu kendala yang terjadi dan dihadapi oleh Pemerintah Desa Sukapura. Tindak lanjut dari adanya website yang *error* tersebut, ditindaklanjuti oleh Sekretaris Desa selaku admin dari website untuk melaporkannya kepada dinas terkait yaitu Diskominfo Kabupaten Bandung. Laporan tersebut dilaksanakan pada bulan September 2021. Sehingga pada bulan April 2020 hingga sebelum bulan September 2021, Pemerintah Desa Sukapura tidak melakukan *update* data di dalam website desa tersebut.

Sebagaimana penjelasan dari Sekretaris Desa Sukapura, diperoleh informasi bahwa:

“Aplikasi website desa dapatnya dari Diskominfo itu open SID jadi semua dinas diberi fasilitas website cuman saat ini belum maksimal karena ada error tapi kami sendiri kemarin mendapatkan bantuan dari Telkom University itu untuk dibuatkan website Desa Sukapura Digital, website baru tapi memang belum launching. Baru tahap sosialisasi. Bisa diakses di [sukapura.digital](https://sukapura.digital)”.

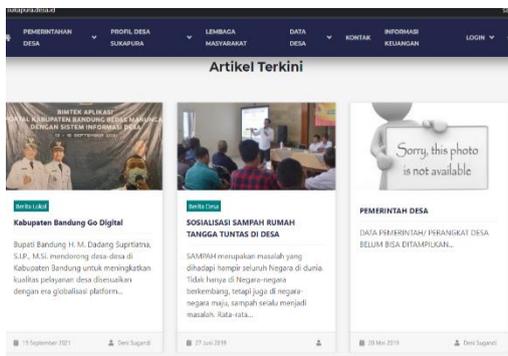
Berdasarkan informasi tersebut, dapat diketahui bahwa kolaborasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah desa dan Tel-U berbentuk pembuatan website desa yang dapat diakses oleh masyarakat melalui [sukapura.digital](https://sukapura.digital). Fungsi website yang baru ini adalah sebagai *back up* dari website pertama yang bersumber dari Diskominfo Kabupaten Bandung. Dengan kata lain, hingga saat ini Desa Sukapura memiliki 2 (dua) buah website sebagai sarana keterbukaan informasi publik, yaitu website yang disediakan oleh Diskominfo yang dapat diakses melalui <https://sukapura.desa.id/>. dan website yang dibuat atas kolaborasi dengan Tel-U yang dapat diakses melalui <https://sukapura.digital/>.

Kendala yang terjadi pada website yang disediakan oleh Diskominfo Kabupaten Bandung terletak pada server yang sering error. Implikasinya, semua isi data pada website sempat hilang, dan membuat informasi pada website tidak dapat di-*update*. Penegasan dari Sekretaris Desa Sukapura bahwa, selama ini kendala dalam pengembangan desa menuju *smart village* tidak terletak pada pemerintahan desa, melainkan terletak pada ketersediaan server oleh Diskominfo Kabupaten Bandung. Sebagaimana penjelasan beliau, yaitu:

“Saat ini memang begitu, sejak bulan November 2019 sd Maret 2020 saya rajin update dan buat artikel untuk website tapi tiba-tiba April eror ini website sampai sekarang dan baru kemarin saya

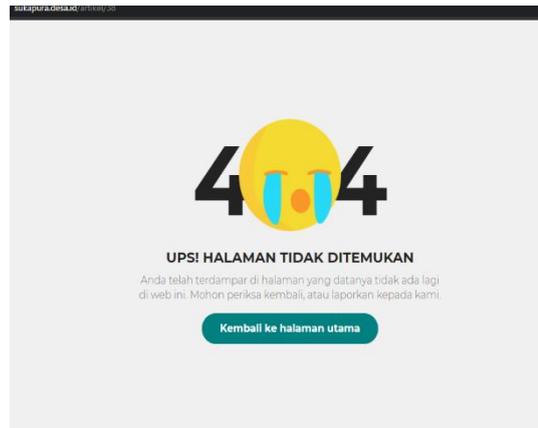
laporkan saat Bimtek, bisa hidup tapi belum maksimal. Di satu sisi kita dituntut untuk keterbukaan informasi publik tapi di sisi lain, fasilitasnya belum maksimal. Kendalanya bukan di desa, kalau desa inginnya semua kegiatan di share ke publik”.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti terhadap website Desa Sukapura memang terjadi informasi yang statis karena tidak dilakukannya *update* data oleh pengelola website yaitu pemerintah desa. Sebagaimana tampilan website di bawah ini:



**Gambar 1. Tampilan Website Desa Sukapura yang Tidak Update**

Pada tampilan website pada gambar 1. diketahui bahwa berita terkini yang di *update* oleh Admin Website adalah pada tanggal 15 September 2021, dan berita sebelumnya adalah informasi pada tanggal 27 Juni 2019. Informasi tersebut menunjukkan bahwa terjadinya server yang error dapat berimplikasi pada data atau informasi desa yang tidak bisa dipublikasikan melalui website. Sementara, selain tidak update nya informasi pada website, juga terdapat isi informasi yang hilang atau tidak dapat diakses datanya, dan Operator website pun tidak mengetahui mengapa hal tersebut bisa terjadi. Sebagaimana gambar di bawah ini:



**Gambar 2. Informasi Lembaga Kemasyarakatan Desa Sukapura Tidak Bisa Diakses**

Sementara itu, untuk mengantisipasi website yang error dan informasi yang hilang sebagaimana yang telah terjadi pada website Desa Sukapura, maka Pemerintah Desa melakukan kolaborasi dengan Tel-U untuk membuat perancangan website baru yang dapat diakses melalui sukapura.digital. Tampilan dari website sukapura.digital adalah sebagai berikut:



**Gambar 3. Tampilan Website sukapura.digital**

Melalui gambar di atas, Pemerintah Desa Sukapura telah menghadirkan website baru yang difungsikan sebagai media keterbukaan informasi publik. Tidak hanya itu, melalui website sukapura.digital, juga dirancang bahwa masyarakat dapat melakukan pengajuan administrasi surat dan pengaduan masyarakat secara *online*. Salah satu perbedaan antara website desa dari Diskominfo Kabupaten Bandung dengan website desa

digital adalah, pada website desa digital terdapat inovasi baru yang dimunculkan oleh perangkat desa, yaitu adanya komunikasi 2 (dua) arah antara masyarakat dengan pemerintah desa. Dimana pada website desa.digital tersebut, terdapat menu yang dapat digunakan oleh masyarakat yang akan mengajukan keperluan administrasi dan pengaduan secara *online*.

Masyarakat dapat mengajukan surat sesuai kebutuhan seperti bila ingin mengurus persyaratan pembuatan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk (KTP), atau pengajuan surat pindah atau ingin memperoleh surat pengantar keterangan usaha dari desa. Adapun pengajuan surat diharapkan dapat langsung dilakukan melalui website tersebut, dimana keseluruhan prosesnya pun bisa langsung dilihat secara langsung oleh masyarakat melalui website desa. Sebagaimana tampilan website desa.digital, terdapat menu pelayanan yang di dalamnya terdapat pilihan pengajuan surat, pelaporan, persyaratan surat, status pengajuan surat hingga status pelaporan yang dilakukan oleh penduduk Desa Sukapura.

Hingga penelitian ini dilakukan, website desa.digital memang belum berjalan secara optimal, dimana masih tahap awal pengembangan website. Sebagaimana informasi dari Kepala Seksi Pemerintahan Desa Sukapura bahwa:

“Untuk kerjasama, kita sudah lakukan bersama Tel-U alhamdulillah dibantu sama mereka untuk aplikasi pelayanan yang baru tapi masih dalam perbaikan karena ada beberapa item yang ingin dimasukkan ke aplikasi tersebut. Kerjasama nya baru dilakukan karena ada program pengabdian masyarakat dari pihak Tel-U, ada beberapa hal yang dikerjakasikan diantaranya aplikasi untuk pelayanan, kewirausahaan, dan pengelolaan sampah. Cuma memang semuanya belum berjalan maksimal karena memang tahapannya juga lumayan ya. Tahapan dari mulai analisa permasalahan/kendala, kebutuhannya apa saja, pelatihan SDM atau tenaga operasionalnya,

sosialisasi nya ke masyarakat juga kan perlu. Agak susah jika aplikasi bisa berjalan sesuai tema juga. Jadi kita berbasis teknologi juga jadi masyarakat nggak perlu datang ke desa bolak balik jadi kita mau cukup sampai di RT/RW jadi bisa pakai barcode juga. Lalu kerahasiaan data kependudukan juga perlu dipikirkan”.

Pernyataan tersebut sejalan dengan pernyataan dari Sekretaris Desa Sukapura, bahwa:

“Kalau SID itu website desa, saya melihat dari infrastukturnya bisa terintegrasi semua dari laporan dll. Bedanya dengan website Tel-U sebetulnya dua duanya semangatnya sama untuk membangun digitalisasi desa membangun seluruh pelayanan secara online. Tapi ya fungsinya website Tel-U di back up secara online. Jadi ya nanti di-combine jika yang satu servernya down bisa di-combine dengan website lainnya, tujuannya sih kesitu. Kalau SID itu lingkupnya nasional seluruh desa di Indonesia pakai itu Cuma kendalanya banyak ya servernya error, data hilang walau dari sisi penggunaan dan pengelolaannya mudah. Tapi kalau down dan semua artikel yang kita punya hilang seperti itu jadi kami khawatir jadi kami back up dengan Sukapura Digital walau memang parsial ya khusus Sukapura. Host dan domain dibantu dari Tel-U.”

Keberadaan website desa digital diharapkan mampu memperkuat pengembangan Desa Sukapura menuju *smart village*, dimana website desa berfungsi dalam promosi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, dimana masyarakat dapat mengetahui semua hal atau aktifitas yang dilakukan oleh pemerintahan desa. Website tidak hanya bisa menjadi media publikasi kegiatan desa, melainkan juga dapat menjadi simbol dari keterbukaan informasi publik. Dengan kata lain, Desa Sukapura mendukung

adanya keterbukaan informasi publik sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Selain itu juga, website digital desa dapat mewujudkan sarana komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat. Dimana pada website tersebut terdapat menu pengaduan online bagi masyarakat. Selanjutnya, dengan memanfaatkan website desa, maka otomatis dapat melakukan promosi potensi desa. Setiap desa tentunya memiliki potensi yang dapat menarik minat masyarakat luar. Misalnya kearifan lokal, kekayaan budaya, kuliner bahkan potensi wisata alam yang bisa dikembangkan. Dengan adanya website membantu pemerintah dalam melakukan promosi tersebut sehingga banyak orang yang mengetahui dan tertarik untuk berkunjung. Hal ini tentu mendatangkan keuntungan tersendiri bagi masyarakat Desa Sukapura.

Terkait dengan keterbukaan informasi publik disinggung oleh Kepala Desa Sukapura, dimana melalui website desa diharapkan mampu mewujudkan keterbukaan informasi publik tersebut. Namun dalam pelaksanaannya, terdapat kendala dari Diskominfo yaitu *server error* sehingga mengakibatkan belum *updatenya* informasi pada website Desa Sukapura tersebut. Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Kepala Desa Sukapura, bahwa:

“Keterbukaan publik tapi website belum update. Kemarin juga sudah ada pelatihan kebetulan operator pak sekdes yang datang dan sudah diprotes. Alasannya dari dinas sedang diperbaiki karena hosting nya kan dinas. Kecuali kalau kita diperbolehkan untuk membuat domain dan hosting sendiri ya kita tinggal bayar. Tapi ya ada beberapa desa yang memang eror websitenya. Untuk yang mengupdate informasi adalah perangkat desa itu di website desa, jadi kita mendukung keterbukaan informasi publik. Keterbukaan informasi publik tidak bisa kita lakukan karena ada kendala eror karena kasihan masyarakat yang ingin melihat profil desa atau data desa nggak perlu datang ke desa,

bisa dilihat saja di website desa. Sekarang ada program desa digital ini masuk dari kementerian desa, itu bisa mendukung *smart village* ya, jadi kita mau mengajukan apakah desa kita sudah memenuhi standarnya, ada ruang, ada operatornya. Karena Sukapura menjadi percontohan dan berbatasan dengan Kota Bandung jadi kita harus sedikit modern lah jadi nanti di RW harus kita siapkan internet, laptopnya supaya cek KK sudah jadi atau belum cukup di RT/RW saja nggak perlu atang di desa, Tandatangan saja cukup pakai barcode saja nanti.

Manfaat lainnya yang diharapkan adalah melalui website sukapura.digital tersebut maka dapat meingkatkan kualitas pelayanan pemerintah desa kepada masyarakat. Mengingat pemerintah bisa memberikan informasi terkait pelayanan melalui website desa. Selain itu pemerintah desa juga membuka layanan berbasis online yang tentunya mempermudah para masyarakat. Layanan berbasis online tersebut dalam bentuk pengajuan administrasi surat yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Dimensi institusi juga erat kaitannya dengan keberadaan regulasi yang menjadi pedoman bagi pemerintah desa dalam melaksanakan pengembangan desa menuju *smart village*. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan diperoleh informasi bahwa dalam pengembangan desa menuju *smart village*, Pemerintah Desa berpedoman pada Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa diamanatkan bahwa tiap desa diarahkan dapat mewujudkan SDG's

(*Sustainable Development Goals*). Hal tersebut sebagaimana informasi dari Sekretaris Desa Sukapura, bahwa:

“Untuk saat ini kita acuannya UU 6/2014, Permendes Nomor 21 Tahun 2020 karena disitu jelas ada 18 poin untuk SDG’s jadi memang tujuannya kesana, salah satunya ada digitalisasi desa hingga pada akhirnya desa menjadi smart. Kalau saya perhatikan arahnya ke *smart government*, dan sepertinya nantinya akan dirumuskan Peraturan Bupati Go Digital tersebut kalau sekarang untuk peraturan itu sepertinya belum ada”.

Merujuk pada hasil wawancara tersebut, disimpulkan bahwa terkait dengan regulasi khusus terkait *smart village* yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung atau Pemerintah Desa Sukapura itu sendiri, belum dirumuskan. Sebagaimana hasil penelitian dari Rahmadanita (2017) bahwa dalam pengembangan sebuah kota pintar dan pemerintahan yang cerdas (*smart government*), maka diperlukan salah satu upaya dari pemerintah kota atau kabupaten untuk menyusun Peraturan Daerah pendukung *smart government* tersebut. Disamping regulasi yang jelas, diperlukan juga sebuah *master plan smart village* tersebut di Kabupaten Bandung. Mengingat keberadaan rencana induk tersebut dapat dimanfaatkan sebagai acuan dari pengembangan suatu desa menuju *smart village* terutama di Kabupaten Bandung. Dengan demikian, regulasi yang jelas akan menjaga keberlanjutan dari program *smart village* itu sendiri.

### 3) Teknologi

Selain tersedianya sumber daya dan kesiapan institusi, dalam pengembangan Desa Sukapura menuju *smart village* juga perlu mempersiapkan teknologi. Dalam dimensi teknologi dapat diukur dari adanya efisiensi dan tahan lama, biaya rendah, ramah pengguna dan perawatan yang mudah. Adapun teknologi yang mendukung pengembangan Desa

Sukapura menuju *smart village* dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3. Teknologi Yang Dimiliki Desa Sukapura**

No.	Jenis Teknologi
1.	Wifi
2.	CCTV
3.	Sensor Pintu
4.	Komputer (PC)
5.	Laptop
6.	Proyektor
7.	Aplikasi
8.	Website

Sumber: Diolah Peneliti, 2021

Merujuk pada tabel tersebut, diketahui bahwa Pemerintah Desa masih memiliki teknologi yang terbatas yaitu sebagaimana yang disajikan pada tabel tersebut. Sementara untuk teknologi berupa perangkat lunak berupa *software*, serta *Host* dan *Domain* disediakan oleh Diskominfo Kabupaten Bandung. Oleh sebab itu, apabila terjadi server yang error pada website atau data yang hilang pada aplikasi atau website yang dikelola Pemerintah Desa Sukapura sangat berdampak pada terhambatnya *update* data dan terhambatnya pelayanan kepada masyarakat karena pelayanan kembali dilakukan secara manual.

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada uraian sebelumnya bahwa Pemerintah Desa Sukapura memiliki website desa yang disediakan oleh Diskominfo Kabupaten Bandung, dan memiliki aplikasi pendukung *smart village*, diantaranya: YANYESDUK, PRODESKEL dan Aplikasi 4.2. Aplikasi Pelayanan Dasar Berbasis Data Kependudukan. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala yang berdampak pada terhambatnya pelayanan di Desa Sukapura. Sebagaimana pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Seksi Pemerintahan Desa Sukapura, diperoleh informasi bahwa:

“Sebenarnya kalau mengikuti perkembangan jaman mah, semuanya harus berbasis digital ya apalagi *smart village* terus terkait dengan SDG’s juga. Pelaksanaan

semuanya menggunakan teknologi ya. Kalau secara tupoksi dari seksi pemerintahan diantaranya untuk administrasi kependudukan. Nah terkait itu kita dulu pernah juga ada namanya Layanan Kependudukan Cuma untuk sekarang ini servernya itu error juga. Servernya dari Disdukcapil. Kalau gak salah error sekitar 3 sampai 4 bulanan ini hingga akhirnya kita pakai manual juga. Di sisi lain, untuk profil desa itu kan harus diekspos ke publik juga ya, nah itu dibawah bimbingan Diskominfo, Cuma untuk saat ini belum jalan juga sih karena servernya belum siap kayaknya. Itu namanya Sistem Informasi Desa (SID) dimana segala jenis kebutuhan data ada di sana. Cuman untuk saat ini belum berjalan maksimal sih. Di bidang pertanahan juga saya juga lagi belajar sih bagaimana caranya agar si basic data bisa terintegrasi pada sebuah aplikasi. Tapi masalahnya aplikasinya itu berbayar juga sih jadi memang kita belum punya aplikasi yang ready lah”.

Merujuk pada hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa selain Website yang disediakan oleh Diskominfo Kabupaten Bandung, juga terdapat aplikasi yang disediakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bandung yaitu aplikasi YANDESDUK. Aplikasi YANYESDUK berisikan data yang terintegrasi antara desa dengan Disdukcapil Kabupaten Bandung. Namun saat ini aplikasi tersebut tidak dapat diakses dan digunakan oleh perangkat desa karena servernya juga error. Padahal, berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan, seluruh perangkat desa menyatakan bahwa dengan menggunakan YANYESDUK tersebut maka pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih mudah dan efisien, karena aplikasinya juga mudah digunakan, serta ramah pengguna. Aplikasi tersebut disediakan gratis oleh Disdukcapil dan melalui operator yang ditugaskan, yaitu Kepala Seksi Pelayanan, YANYESDUK pun dapat dimanfaatkan. Informasi tersebut kembali

ditegaskan oleh Kepala Seksi Pemerintahan Desa Sukapura, bahwa:

“Masalah server sekitar empat bulanan. Awalnya aplikasi sudah ada, tapi entah kenapa karena memang tidak ada kabar yang pasti. Sampai saat ini belum berjalan, hampir semua desa di Kabupaten Bandung mengalami. Itu berdampak juga di satu sisi untuk layanan, untuk database kependudukan lahir mati pindah datang keluar akhirnya kan kita harus entry manual. Kalau dari sistem aplikasi kan sudah otomatis ya kalau misalkan jumlah pengurangan penduduk akibat pindah datang lahir mati sudah otomatis. Karena tidak ada aplikasi itu kita kerepotan. Aplikasi itu berjalan lumayan sekitar 2016 kalau tidak salah untuk aplikasi YANDES. YANDES itu sistem kerjanya masyarakat masih harus datang ke desa. Makanya kita kemarin itu kerjasama dengan Tel-U bagaimana caranya agar masyarakat lebih mudah lah karena masyarakat banyak yang kerja, jadi kalau sistem birokrasinya cukup sampai tingkat RT/RW nanti kan biar sistem aplikasi ya yang jalan, punya data *entry-an* atau apa lah.”

Permasalahan server yang menjadi kendala tersebut perlu ditindaklanjuti secara cepat oleh Pemerintah Desa Sukapura, namun berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, bahwa perangkat desa sudah melaporkannya kepada Disdukcapil dan Diskominfo tetapi penanganannya belum cepat. Oleh sebab itu, Pemerintah Desa Sukapura kembali melakukan pelayanan kepada penduduk desa melalui cara konvensional atau manual. Saat ini, pelayanan kependudukan dilakukan melalui Aplikasi yang dioperasikan secara *offline* yaitu aplikasi 4.2. aplikasi Pelayanan Dasar Berbasis Data Kependudukan. Menurut Kepala Seksi Pelayanan Desa Sukapura, aplikasi *offline* tersebut juga dapat membantu perangkat desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat agar pelayanan bisa cepat selesai,

namun tidak secepat saat menggunakan YANDESDUK. Mengingat jika menggunakan aplikasi *offline*, perangkat desa harus menginput satu per satu data yang belum ada di sistem tersebut.

Aplikasi YANYESDUK dinilai dapat memberikan kemudahan serta dapat mempercepat pelayanan kependudukan di Desa Sukapura. Namun, saat ini aplikasi tersebut tidak dapat dimanfaatkan oleh perangkat desa karena servernya error, dan perangkat desa sudah melaporkan kepada Disdukcapil namun belum ditindaklanjuti hingga penelitian ini dilakukan. Dalam pemanfaatannya, aplikasi YANYESDUK tetap mengharuskan masyarakat datang ke kantor desa untuk mengurus surat yang dibutuhkan. Saat ini, apabila masyarakat ingin mengurus administrasi surat, maka pelayanan dilakukan menggunakan aplikasi *offline*.

Salah satu inovasi yang dibuat oleh Pemerintah Desa Sukapura adalah dengan membuat suatu layanan kepada masyarakat yang tidak mengharuskan masyarakat untuk datang ke kantor desa. Saat ini tengah dirancang website *sukapura.digital* sebagaimana penjelasan sebelumnya, yang di dalamnya terdapat fitur bagi masyarakat yang mau melakukan pengurusan administrasi surat secara *online*. Kemudahan tersebut diharapkan kedepannya dapat memudahkan semua urusan masyarakat karena diketahui bahwa sebagian besar penduduk di Desa Sukapura merupakan pekerja kantor sehingga tidak memiliki waktu yang banyak untuk bisa datang ke kantor. Sehingga, diharapkan kedepannya, Pemerintah Desa Sukapura dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa harus datang ke kantor desa.

Alur pelayanan yang diharapkan dapat dilakukan kedepannya adalah masyarakat dapat mengusulkan administrasi surat melalui *online* dan dapat ditindaklanjuti oleh ketua RT/RW, dan proses akan selesai di ketua RT/RW tersebut. Adapun kebutuhan tanda tangan surat oleh Kepala Desa Sukapura direncanakan menggunakan *barcode*. Peneliti menilai bahwa inovasi yang dimiliki oleh Pemerintah Desa Sukapura adalah suatu

iktikad yang baik. Namun, inovasi tersebut belum dituangkan ke dalam sebuah dokumen perencanaan, atau dokumen dalam bentuk *grand desain* atau *blue print*. Dengan demikian, inovasi tersebut dapat terarah dan tersistem secara lebih baik.

Berdasarkan uraian di atas, disimpulkan bahwa dalam dimensi teknologi, Pemerintah Desa Sukapura belum memiliki teknologi khusus dikarenakan teknologi tersebut disediakan oleh Diskominfo dan Disdukcapil Kabupaten Bandung. Adapun semua teknologi yang dimanfaatkan oleh Pemerintah Desa Sukapura dinilai cukup efisien namun cenderung tidak tahan lama, memiliki biaya rendah yaitu gratis, ramah pengguna dan perawatan yang mudah. Namun, masih terdapat kendala terkait server yang *error* pada aplikasi YANYESDUK dan website Desa Sukapura. Mengingat bahwa salah satu faktor yang berpengaruh pada tahapan pengembangan *smart village* adalah tersedianya teknologi yang memadai (Djunaedi & Herwangi, 2019), maka Pemerintah Kabupaten Bandung perlu segera menindaklanjuti permasalahan yang masih terjadi pada dimensi teknologi tersebut.

#### 4) Keberlanjutan

Dimensi terakhir yang juga perlu diperhatikan dalam pengembangan Desa Sukapura menuju *smart village* adalah dimensi keberlanjutan. Keberlanjutan merupakan suatu aspek yang perlu dilakukan karena *smart village* merupakan suatu proses yang panjang dan dapat memberikan kemudahan bagi pemerintah dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang *smart*. Keberlanjutan dapat diukur melalui nol polusi, pendekatan desentralisasi, efisien dan layak, serta perencanaan jangka panjang.

Sebagaimana uraian sebelumnya bahwa, pengembangan desa menuju *smart village* didukung oleh teknologi dan aplikasi dari Disdukcapil dan Diskominfo Kabupaten Bandung. Terkait dengan aspek nol polusi, sejauh ini peneliti belum mendapati teknologi yang berkaitan erat atau langsung dengan emisi. Adapun teknologi yang terkait dengan

*smart village* di Desa Sukapura adlaah lebih cenderung pada aspek administrasi pemerintahan. Di sisi lain, terdapat titik pengolahan sampah dimana peneliti belum mendapati lebih jauh mengenai hal tersebut, namun sepertinya hal tersebut belum dikembangkan lebih jauh mengingat, pengolahan sampah tersebut masih menunggu alat dari Tel-U sebagai bagian dari kerjasama dengan pihak akademisi.

Sementara, pengembangan desa menuju *smart village* sebagaimana informasi yang peneliti dapatkan di lapangan bahwa, inisiasi awal *smart village* bermula dari adanya arahan dari Pemerintah Pusat dimana desa diarahkan untuk mewujudkan *Sustainable Development Goals*. Selanjutnya, kedua dinas di Kabupaten Bandung yaitu Diskominfo dan Disdukcapil pun berinisiasi untuk menyediakan website dan aplikasi untuk dimanfaatkan oleh desa di Kabupaten Bandung, termasuk Desa Sukapura. Adapun pendekatan desentralisasi yang diterapkan oleh Pemerintah Desa dalam pengembangan desa menuju *smart village* belum dilaksanakan secara maksimal. Hal ini sebagaimana pernyataan dari Sekretaris Desa Sukapura, yaitu:

“Aspirasi dari masyarakat, MUI dll untuk pemerintah tidak begitu banyak yang memberikan saran karena dalam 2 tahun kebetulan mengalami pandemi, yang lebih muncul itu saat ini lebih ke masalah bantuan-bantuan, apakah itu komplain, kritikan, sejauh ini belum begitu terdengar aspirasi masyarakat. Bantuan bentuknya ada yang cash, sembako, ke masyarakat”.

Merujuk pada informasi tersebut, diketahui bahwa masyarakat belum terlibat secara keseluruhan dalam pengembangan Desa Sukapura menuju *smart village*. Dimana sepanjang pengembangan *smart village* tersebut, cenderung lebih banyak kegiatan diinisiasi oleh pemerintah desa. Dengan kata lain, masyarakat hanya menerima pelayanan apa saja yang disediakan oleh pemerintah. Walaupun pemerintah membuka seluas-

luasnya akses bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan saran. Dimana masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya melalui ketua RT, ketua RW atau langsung datang ke kantor Desa Sukapura, serta dapat disampaikan melalui website SID juga telah disediakan kolom khusus untuk aduan masyarakat.

Terkait dengan efisiensi dan kelayakannya program *smart village* itu sendiri, secara sepakat seluruh informan menyatakan bahwa adanya *smart village* dapat mewujudkan pelayanan yang lebih efisien kepada masyarakat, terutama melalui website desa dan YANYESDUK. Walau dalam perjalanannya, kedua perwujudan *smart village* tersebut mengalami permasalahan. Namun bila dinilai dari sisi kelayakan, menurut peneliti, teknologi yang disediakan oleh Diskominfo dan Disdukcapil belum cukup layak untuk dimanfaatkan dalam jangka panjang. Hal ini terlihat dari hingga saat penelitian ini dilakukan, masih terdapat server *error* yang belum ditindaklanjuti secara maksimal oleh kedua dinas tersebut.

Berkaitan dengan perencanaan jangka panjang, peneliti menilai bahwa pengembangan Desa Sukapura menuju *smart village* perlu direncanakan dalam jangka panjang. Bahkan peneliti mengusulkan agar pengembangan *smart village* ini dapat disusun secara sistematis dan terstruktur, dimulai dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, kemudian berlanjut pada Pemerintah Kabupaten Bandung, hingga kemudian bermula pada level pemerintahan desa. Peneliti mengusulkan bahwa, pondasi dari keberlanjutan *smart village* perlu dituangkan ke dalam *blue print* atau regulasi yang lebih jelas agar tiap desa di Kabupaten Bandung dapat mengembangkan desanya menjadi *smart village* dengan kepastian hukum yang jelas.

Berdasarkan informasi dari Sekretaris Desa Sukapura, diketahui bahwa:

“Peluang kedepan itu ya artinya untuk saat ini arahan dari pusat lebih ke pemulihan ekonomi nasional, artinya sekarang kita dari pembangunan 2022 arahnya juga

kesana, sifatnya pemulihan ekonomi bahkan mungkin dengan *smart village* akan terbantu lagi, arahan gubernur juga kan dari aplikasi-aplikasi yang ada potensinya kalau dilihat banyak sekali Mahasiswa sebagai pangsa pasar. Anak-anak muda di Desa Sukapura juga sudah meleak teknologi”.

Keberlanjutan difungsikan untuk menentukan perencanaan jangka panjang kemana arah yang diharapkan dari pengembangan desa menuju *smart village* tersebut. Sebagaimana informasi hasil wawancara dan pengamatan di lapangan, peneliti menilai arah pengembangan *smart village* belum jelas. Selama ini, Pemerintah Desa hanya menerima teknologi yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung. Namun, desa dituntut melakukan inovasi dan dapat memilih akan menggunakan teknologi mana dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat Desa Sukapura. Sebagaimana hasil wawancara kepada Sekrtaris Desa Sukapura, bahwa:

“Kalau dari sisi pemerintah kabupaten juga tidak memaksakan desa untuk menggunakan website dari dinas ya, pemerintah kabupaten mendorong desa untuk berinovasi. Ada di peraturan bupati 110/2019 kegiatan prioritas dana desa adalah pembuatan website desa, artinya, diberikan keleluasaan, kewenangan kepada desa apalagi saat ini keterbukaan informasi publik menjadi salah satu concern. Dengan dasar itu pemerintah kabupaten bandung mengembalikan ke desa untuk berinovasi makanya kita bekerjasama dengan Tel-U jadi tidak bergantung dengan kabupaten. Kita juga bisa memanfaatkan Tel-U untuk pendampingan karena dekat.”

Peneliti menilai bahwa dengan adanya kebebasan berinovasi, maka Pemerintah Desa dapat dengan mudahnya melakukan inovasi dengan melaksanakan kerjasama dan kolaborasi dengan Akademisi. Inovasi telah dilakukan dalam hal perancangan

website baru dengan melakukan kolaborasi dengan Tel-U. Namun, peneliti menilai, inovasi tersebut sebaiknya dapat dilakukan dan dikembangkan dalam dokumen tertulis yang terencana dan terstruktur. Dengan tujuan, agar inovasi yang dilakukan dapat jelas arah dan pengembangannya kedepan.

Pemerintah Desa Sukapura perlu membuat dokumen perencanaan tertulis untuk menentukan arah pengembangan desa menuju *smart village*. Arah dan tahapan yang jelas dapat membantu pemerintah desa dalam melakukan perencanaan jangka panjang dan keberlanjutan *smart village* dapat diwujudkan. Sebagaimana hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Sukapura, bahwa:

“Harapan ke depan adalah kita betul-betul sudah *smart village* selama periode. Jadi titik batas desa dengan wilayah ada CCTV dan sudah harus terintegrasi. Cita-citanya bisa menjadi desa centre. Karena kan banyak kejadian seperti Mahasiswa kecurian motor, nah jika kita punya CCTV di setiap batas desa jadi bisa terkontrol. Saat ini CCTV hanya di wilayah pemerintah desa saja, kedepannya targetnya 1 RW inginnya ada 1 CCTV.”

Merujuk pada uraian di atas, disimpulkan bahwa *smart village* yang menjadi harapan dari Pemerintah Desa Sukapura adalah *mengcover* semua kebutuhan masyarakat desa. Tidak hanya dari aspek pelayanan di kantor desa saja tetapi juga secara *smart* dapat mewujudkan *smart people* dari penduduk Desa Sukapura dan *smart environment* dari keamanan yang terjamin diciptakan oleh Pemerintah Desa Sukapura untuk masyarakatnya. *Smart people* telah mulai dilakukan melalui keikutsertaan penduduk Desa Sukapura yang belum selesai sekolah untuk melanjutkan pendidikan melalui Paket A, B, dan C dengan tanpa biaya dan difasilitasi oleh pemerintah desa. Sementara terkait dengan *smart environment* kedepannya diharapkan dapat terwujud, salah satunya dengan penempatan CCTV di tiap titik strategis di wilayah Desa Sukapura, karena

saat ini CCTV hanya ada di lingkungan kantor desa saja.

## B. Diskusi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan Desa Sukapura menuju *smart village* didukung oleh sumber daya manusia yang cepat beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi. Sumber daya manusia perangkat desa dinilai cukup mumpuni dalam hal memberikan pelayanan kepada masyarakat walaupun dengan keterbatasan sarana dan prasarana pendukung yang disediakan. Sumber daya manusia yang mumpuni, memadainya sarana prasarana dan tata kelola yang baik merupakan kondisi ideal bagi penerapan konsep *smart village* (Shabrinawati & Yuliasuti, 2020). Keberadaan sumber daya manusia yang mumpuni juga dinilai sebagai salah satu unsur penting dalam penerapan kebijakan *smart village*, disamping kejelasan pembagian kewenangan dan informasi yang disampaikan (Ardiyasa & Rahayu, 2022). Artinya, Desa Sukapura telah memenuhi satu kondisi ideal tersebut yaitu adanya sumber daya manusia terutama perangkat desa yang cukup mumpuni dan adaptif menerima perubahan. Sikap adaptif menerima perubahan merupakan salah satu sikap yang diharapkan terjadi terutama bagi penyelenggara pemerintahan. Mengingat, perkembangan teknologi yang begitu cepat menuntut pemerintah terutama pada level desa untuk bisa terus meningkatkan kualitas pelayanan yang serba cepat, mudah, murah, dan tepat sasaran.

Sementara itu melalui pengembangan *smart village* yang dilakukan, telah memberikan dampak pada peningkatan kualitas pendidikan masyarakat di wilayah Desa Sukapura. Keterlibatan masyarakat dalam pengembangan Desa Sukapura menuju *smart village* tergambar pada keikutsertaan masyarakat pada program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa. Salah satunya program pendidikan gratis untuk mengikuti Paket C yang berimplikasi pada meningkatnya pendidikan masyarakat di Desa Sukapura. Hal tersebut menunjukkan bahwa

pengembangan Desa Sukapura menuju *smart village* didominasi oleh inisiasi pemerintah desa. Hal ini masih bersesuaian dengan temuan penelitian sebelumnya bahwa inisiasi dari pihak pemerintah dapat mendorong upaya serius dalam mewujudkan *smart village*, disamping pihak pemerintah dinilai perlu membuka peluang kerjasama dengan pihak luar (Subekti & Damayanti, 2019). Namun di sisi lain, keterlibatan masyarakat secara keseluruhan dalam proses pengembangan *smart village* belum tergambar secara jelas karena sepanjang pengembangan *smart village* tersebut, cenderung lebih banyak kegiatan diinisiasi oleh pemerintah desa. Temuan penelitian tersebut tidak sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa keterlibatan aktor masyarakat menjadi unsur yang dominan dalam penerapan *smart village*, yang terwujud pada inisiasi masyarakat mengelola kegiatan rutin dalam bentuk badan keswasayaan masyarakat bersama dengan komunitas lainnya seperti komunitas olahraga dan seni (Kelvin et al., 2022). Selain itu keterlibatan elemen masyarakat dalam penerapan *smart village* dinilai mampu mendatangkan banyak investor ke desa (Rahayu, 2022). Elemen masyarakat yang terlibat secara aktif merupakan elemen penting dalam rangka mencapai *smart village*, dan salah satu upaya mencapainya adalah apabila ada kepercayaan dari masyarakat kepada aparaturnya (Sulistiyowati et al., 2021).

Kepercayaan masyarakat berhubungan dengan keterbukaan dan transparansi dari pemerintah desa. Oleh sebab itu Pemerintah Desa Sukapura menyediakan website desa sebagai salah satu media keterbukaan informasi publik. Walau dalam pelaksanaannya, masih terdapat beberapa kendala terkait dengan media teknologi tersebut, salah satunya adalah adanya server yang error kurang stabilnya tampilan website sukapura saat diakses oleh masyarakat. Sementara itu, dalam pengembangan *smart village*, teknologi yang mumpuni menjadi kunci keberhasilan dan merupakan suatu aspek yang perlu diupayakan, disamping

mewujudkan peningkatan kapasitas perangkat desa dan memandirikan masyarakat (Rachmawati, 2018). Hadirnya teknologi merupakan upaya dalam menumbuhkan kesadaran dan penguatan kapasitas masyarakat agar dapat berkontribusi dalam pengembangan *smart village* (Premana et al., 2022).

Di sisi lain, Pemerintah Desa Sukapura belum memiliki regulasi dan *master plan* yang jelas dalam bentuk Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Desa Sukapura yang mendukung pengembangan *smart village*. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya yang menilai bahwa pedoman dan panduan dibutuhkan agar pengembangan *smart village* dapat lebih matang (Rachmawati, 2018). Pengembangan Desa Sukapura yang memberikan dampak bagi kehidupan masyarakat dinilai dapat dilakukan secara bertahap untuk mencapai keberlanjutan dalam jangka panjang. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa penerapan *smart village* mampu memberi dampak dan mengupayakan pelaksanaan desa yang mengacu pada potensi desa, terwujudnya transparansi penyelenggaraan pemerintahan desa, terwujudnya kepercayaan masyarakat yang meningkat terkait penyelenggaraan pemerintahan desa, adanya partisipasi masyarakat kontrol dari masyarakat pada penyelenggaraan pemerintahan desa (Kusdarini et al., 2020). Peneliti menilai bahwa pengembangan Desa Sukapura menuju *smart village* dapat dilakukan dalam jangka panjang dan berkelanjutan dengan terus memperhatikan sinergitas dari pengembangan *smart village* tersebut. Sinergitas dapat terlaksana dengan mengoptimalkan komunikasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat, umpan balik yang cepat dari masyarakat dan pemerintah, adanya kepercayaan dari masyarakat, serta adanya kreativitas dari masyarakat dan pihak pemerintah (Maulana et al., 2022).

## KESIMPULAN

Pengembangan desa menuju *smart village* di Desa Sukapura masih belum dapat dikatakan cukup baik, khususnya pada aspek *smart government* dengan melihat dari keempat dimensi pendukung dalam pengembangan desa menuju *smart village*. Disimpulkan bahwa pada dimensi sumber daya, terdapat sumber daya manusia perangkat desa yang cukup mumpuni dan cepat beradaptasi pada perubahan, dan terdapat peningkatan kualitas pendidikan masyarakat Desa Sukapura. Sementara pada dimensi teknologi, masih terdapat kendala server yang error sehingga berimplikasi pada terhambatnya pelayanan kepada masyarakat. Pada dimensi institusi, pengembangan Desa Sukapura menuju *smart village* belum didukung oleh regulasi dan master plan yang jelas dalam bentuk Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Desa Sukapura. Pada dimensi keberlanjutan, pemerintahan Desa Sukapura berkomitmen dalam mengembangkan desa dalam jangka panjang, namun perlu didukung oleh grand desain dan milestone yang jelas terkait arah dan tahapan dari *smart village* itu sendiri. Oleh sebab itu peneliti merekomendasikan seyogyanya Pemerintah Kabupaten Bandung dapat menyusun Peraturan Daerah yang mendukung pengembangan desa menuju *smart village* di Kabupaten Bandung; seyogyanya Pemerintah Desa Sukapura dapat menyusun Peraturan Desa pendukung *smart village* dan memperkuat kolaborasi yang telah dilakukan bersama pihak akademisi terutama dengan Tel-U dengan menyusun dokumen kerjasama tertulis dan berkelanjutan sehingga arah pengembangan *smart village* bisa semakin jelas; seyogyanya Pemerintah Desa Sukapura dapat melakukan optimasi pemanfaatan website desa dan melakukan sosialisasi secara bertahap dan berkelanjutan kepada masyarakat desa; dan diharapkan penelitian ini dapat menjadi dasar bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji fokus penelitian yang sama terutama terkait *smart village* dengan sudut pandang yang berbeda.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahlawat, NoJ. (2017). *Smart villages*, Information Communication Technology and Geographical Information System. *International Journal of Current Trends in Science and Technology*, 7(8).
- Ardiyasa, G. G., & Rahayu, E. (2022). Implementasi Kebijakan Smart Kampung Di Kabupaten Banyuwang. *Jurnal Moderat*, 8(4). <https://Ojs.Unigal.Ac.Id/Index.Php/Modrat/Article/View/2863/2140>
- Aziiza, A. A., & Susanto, T. D. (2020). The *Smart village* Model for Rural Area (Case Study: Banyuwangi Regency). *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, 722. <https://doi.org/10.1088/1757-899X/722/1/012011>
- Djunaedi, V. P. B. A., & Herwangi, Y. (2019). Tahap Pengembangan Smart Kampung di Desa Ketapang Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Planoeath*, 4(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.31764/jpe.v4i2.1000>
- Fitrianti, A. A., Cellindita, S., & Pramnesti, K. (2021). Efektivitas Inovasi Program Smart Kampung Di Desa Ketapang Kabupaten Banyuwangi. *Journal of Governance Innovation*, 3(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.36636/jogiv.v3i1.438>
- Herdiana, D. (2019). Pengembangan Konsep *Smart village* bagi Desa di Indonesia. *Iptek Kom*, 21(1).
- Kelvin, K., Widianingsih, I., & Buchari, R. (2022). Kolaborasi Model Penta Helix Dalam Mewujudkan *Smart village* Pondok Ranji. *J-3P (Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan)*, 7(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.33701/j-3p.v7i2.2587>
- Kusdarini, Aromatica, D., Ariany, R., Koeswara, H., Kabullah, M. I., & Sitriwanti, M. (2020). *Smart village* sebagai Upaya Penguatan Kapasitas Pemerintahan Nagari. *Warta Pengabdian Andalas Jurnal Ilmiah Pengembangan Dan Penerapan Ipteks*, 27(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.25077/jwa.27.1.35-42.2020>
- Maharania, E. N., & Kencono, D. S. (2021). Penerapan smart governance dalam *smart village* di kelurahan dlingo, Kabupaten bantul. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jambi (JISIP-UNJA)*, 5(2). <https://online-journal.unja.ac.id/jisip/article/view/14472/11908>
- Maulana, S., Kagungan, D., & Prihantika, I. (2022). Sinergitas Pelaksanaan Program Smart Village di Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran. *Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan Dan Pelayanan Publik*, 4(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.23960/administrativa.v4i1.119>
- Miles, M. B., & Huberman, M. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Penerbit Universitas Indonesia.
- Prayogi, Y. R., Hardiansyah, F. F., Ramadijanti, N., & Erifani, A. S. A. dan U. (2020). Penerapan Aplikasi Pelayanan Desa berbasis Mobile Dengan Konsep *Smart village* di Desa Pegantenan Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan. *Jurnal Selaparang: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 4(1).
- Premana, A., Sucipto, H., & Widiatoro, A. (2022). Pengembangan Desa Berbasis *Smart village* (Studi Smart Governance pada Pelayanan Prima Desa Tegalreja). *Jilpi: Jurnal Ilmiah Pengabdian Dan Inovasi*, 1(1). <https://journal.ikmedia.id/index.php/jilpi/article/view/15/7>

- Rachmawati, R. (2018). Pengembangan *Smart village* untuk Penguatan *Smart city* dan Smart Regency. *Jurnal Sistem Cerdas*, 1(2).  
<https://doi.org/https://doi.org/10.37396/jsc.v1i2.9>
- Rahayu, S. P. (2022). Penerapan *Smart villagedi* Desamelung Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas (Analisis Penerapan Smart Governance, Smart People, Smart Eonomydi Desa Melung Kecamatan Kedung Banteng Kabupaten Banyumas). *Public Policy And Managament Inquiry*, 6(1).  
<https://doi.org/https://doi.org/10.20884/1.ppmi.2022.6.1.6638>.
- Rahmadanita, A. (2017). *Implementasi Kebijakan Smart government Dalam Mewujudkan Smart city di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Ramachandra, T. ., Hedge, G., Chandran, M. D. S., Kumar, T. A., & Swamiji, V. (2015). *Smart villages Framework*.
- Shabrinawati, A., & Yuliasuti, N. (2020). Implementasi Smart Governance Berdasarkan Konsep *Smart village*. *Jurnal Pikom (Penelitian Komunikasi Dan Pembangunan)* , 21(2).
- Subekti, T., & Damayanti, R. (2019). Penerapan Model *Smart village* dalam Pengembangan Desa Wisata: Studi pada Desa Wisata Boon Pring Sanankerto Turen Kabupaten Malang. *Jurnal of Public Administration and Local Governance*, 3(1).  
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31002/jpalg.v3i1.1358>
- Sulistiyowati, F., Tyas, H. S., Dibyorini, MC. C. R., & Puspitasari, C. (2021). Pemanfaatan Sistem Informasi Desa (SID) untuk Mewujudkan *Smart village* Di Kalurahan Panggungharjo, Sewon, Bantul, DI Yogyakarta. *Jurnal Iptek-Kom (Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Komunikasi)*, 23(1).



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license